

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGATURAN KUOTA JEMAAH
DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA
TAHUN 2022-2024**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Magister Studi Islam



Oleh:

Vika Wafa Ilmi

NIM. 02050123030

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Vika Wafa Ilmi

NIM : 02050123030

Program Studi : Magister Studi Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Tesis : Perubahan Kebijakan Pengaturan Kuota Jemaah dan

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Tahun 2022-2024

Dengan sepenuh hati, saya menyatakan bahwa seluruh isi tesis ini merupakan hasil penelitian dan karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara jelas merujuk pada sumber lain.

Surabaya, 19 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Vika Wafa Ilmi

NIM. 02050123030

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul "Perubahan Kebijakan Pengaturan Kuota Jemaah dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Tahun 2022-2024" yang ditulis oleh Vika Wafa Ilmi ini telah disetujui pada tanggal 19 Juni 2025.

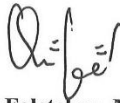
Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

Pembimbing II



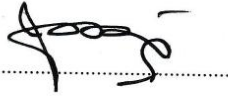
Aun Falestien Faletchan, MHRM., Ph.D.
NIP. 198205142005011001

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

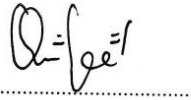
Tesis yang berjudul "Perubahan Kebijakan Pengaturan Kuota Jemaah dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Tahun 2022-2024" yang ditulis oleh Vika Wafa Ilmi, NIM. 02050123030 ini telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 23 Juni 2025. Hasil tesis dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program magister Studi Islam.

Tim Penguji:

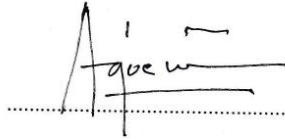
1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.



2. Aun Falestien Faletahan, MHRM., Ph.D.



3. Dr. Agoes Moh. Moefad, SH., M.Si.



4. Dr. Agus Santoso, S.Ag., M.Pd.



Surabaya, 23 Juni 2025

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel
Surabaya




Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.
197103021996031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vika Wafa Ilmi
NIM : 02050123030
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam
E-mail address : vikailmi353@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perubahan Kebijakan Pengaturan Kuota Jemaah

dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Tahun 2022-2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2025

Penulis

(Vika Wafa Ilmi)

ABSTRAK

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selalu menjadi sorotan publik karena kompleksitasnya, baik dari sisi kuota maupun biaya. Pada periode 2022–2024, kebijakan pengaturan kuota dan biaya haji mengalami perubahan kebijakan yang menimbulkan perdebatan dan tantangan bagi jemaah. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perubahan kebijakan, bentuk kebijakan yang dihasilkan, dan dampaknya terhadap jemaah. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan studi kasus. Data diperoleh dari dokumen kebijakan resmi dan wawancara dengan pejabat Kementerian Agama, dianalisis menggunakan *content analysis* dan model interaktif Miles dan Huberman. Secara teoritik, penelitian ini menggunakan *Multiple Streams Framework* John W. Kingdon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan kebijakan kuota dan biaya haji periode 2022–2024 mencerminkan dinamika kebijakan publik yang kompleks, dipengaruhi oleh tekanan global, krisis nasional, dan sensitivitas sosial-politik. Proses kebijakan bersifat reaktif-adaptif dengan pola deliberatif, namun belum sepenuhnya partisipatif. Bentuk kebijakan bersifat inkremental melalui pemeliharaan, revisi, dan pembentukan kebijakan baru. Pada aspek kuota, kebijakan mencakup prioritas keberangkatan jemaah tertunda, penghapusan kuota pendamping lansia, dan perubahan proporsi kuota tambahan. Pada aspek biaya, terjadi peningkatan porsi biaya jemaah, pemanfaatan nilai manfaat, dan reformulasi struktur pembiayaan untuk keberlanjutan fiskal. Dampak kebijakan bersifat ambivalen; di satu sisi secara teknis mampu meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain justru menimbulkan ketidakadilan sosial, beban ekonomi, serta keterbatasan pendampingan bagi jemaah rentan.

Implikasi penelitian ini memperkuat relevansi *Multiple Streams Framework* John W. Kingdon untuk menganalisis perubahan kebijakan publik seperti haji. *Policy window* muncul saat tiga arus yaitu arus masalah, kebijakan, dan politik bertemu, memicu perubahan kebijakan reaktif-adaptif. Kebijakan kuota dan biaya haji bersifat inkremental, memperkuat teori bahwa perubahan publik cenderung bertahap di tengah krisis atau tekanan eksternal.

Kata kunci: *perubahan kebijakan, haji, kuota, biaya*

ABSTRACT

The Hajj pilgrimage's implementation in Indonesia has consistently been the subject of public attention due to its intricacy, which encompasses both quotas and expenses. The Hajj quotas and costs policy underwent adjustments during the 2022–2024 period, which resulted in debate and challenges for pilgrims. The objective of this investigation is to evaluate the process of policy change, the resultant policies, and their influence on pilgrims. A qualitative case study was implemented. Content analysis and the Miles and Huberman interactive model were employed to analyze data obtained from official policy documents and interviews with Ministry of Religious Affairs officials. John W. Kingdon's Multiple Streams Framework was theoretically implemented in this investigation.

The findings suggest that the process of altering Hajj quota and cost policies for the 2022–2024 period is a reflection of intricate public policy dynamics, which are influenced by global pressures, national crises, and socio-political sensitivities. The policy process is reactive-adaptive and employs a deliberative approach; however, it is not yet completely participatory. The policy is incremental in nature, necessitating the development of new policies, revisions, and maintenance. In terms of quotas, policies encompass the prioritization of delayed pilgrim departures, the elimination of the quota for elderly companions, and the modification of the proportion of additional quotas. The utilization of benefit values, an increase in the portion of pilgrim costs, and a reformulation of the financing structure for fiscal sustainability have all contributed to the costs. The policy's effect is ambivalent; while it technically enhances efficiency, it also results in social injustice, economic burdens, and restricted assistance for vulnerable pilgrims.

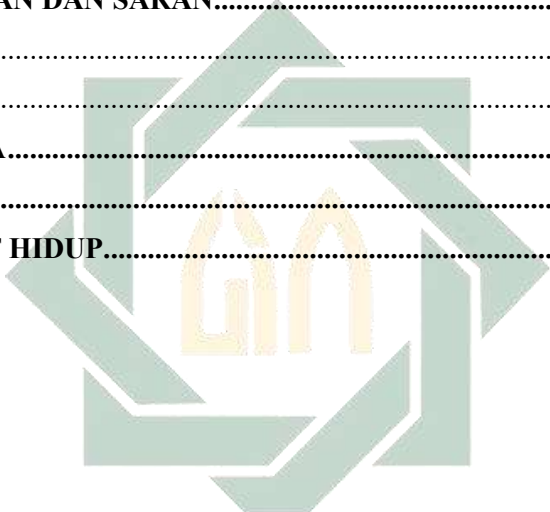
The significance of John W. Kingdon's Multiple Streams Framework for the analysis of public policy changes, such as the Hajj, is reiterated by the findings of this study. A policy window is created when three streams—problem, policy, and politics—converge, resulting in reactive-adaptive policy changes. The Hajj quota and cost policies are incremental, which supports the theory that public change is typically gradual in response to crises or external pressures.

Keywords: *policy change, Hajj, quota, cost.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kerangka Teoretik.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN TEORI	25
A. Konsep Perubahan Kebijakan	25
B. Konsep Dampak Kebijakan.....	30
C. Kelembagaan Penyelenggaraan Haji di Indonesia	31
D. Aspek Kebijakan Pengaturan Kuota Jemaah Haji.....	34
E. Aspek Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	37
BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	40

A. Proses Perubahan Kebijakan	40
B. Bentuk Perubahan Kebijakan.....	50
C. Dampak Perubahan Kebijakan.....	58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Proses Perubahan Kebijakan	66
B. Bentuk Perubahan Kebijakan.....	109
C. Dampak Perubahan Kebijakan.....	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	148



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Rincian Kuota Haji Indonesia Tahun 2022.....	41
Tabel 3.2. Proses Perubahan Kebijakan Pengaturan Kuota Jemaah.....	44
Tabel 3.3. Perbandingan Jumlah BPIH usulan Kemenag dengan DPR.....	47
Tabel 3.4. Proses Perubahan Kebijakan Biaya Haji.....	49
Tabel 3.5. Alokasi Kuota Haji Tambahan 2024.....	53
Tabel 3.6. Bentuk Perubahan Kebijakan Pengaturan Kuota Haji.....	53
Tabel 3.7. Perbandingan Komposisi Nilai Manfaat dan Bipih.....	56
Tabel 3.8. Bentuk Perubahan Kebijakan Pengaturan Biaya Haji.....	58
Tabel 3.9. Dampak Perubahan Kebijakan Kuota Jemaah dan Biaya Haji..	65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Sulthan. “Kementerian Agama Ungkap Alasan Beri Usul Biaya Haji 2024 Rp 105 Juta per Jemaah.” *Tempo.Co*. Last modified 2024. <https://www.tempo.co/politik/kementerian-agama-ungkap-alasan-beri-usul-biaya-haji-2024-rp-105-juta-per-jemaah-121044>.
- Adjie, Hanna Khairunnisa, and Tulus Warsito. “The Reason Why Indonesia Refuses to Add Hajj Quota from Saudi Arabia.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 10 (2022): 392–402.
- Admin. “Menko PMK Apresiasi Aturan Jemaah Lansia Tanpa Pendamping.” *Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan*. Last modified 2023. <https://pekalongan.kemenag.go.id/berita/menko-pmk-apresiasi-aturan-jemaah-lansia-tanpa-pendamping/>.
- Agama RI, Kementerian. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*. Indonesia, 2019.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Ed. Revisi. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Akbar, M. Rizqi. “Aturan Haji 2022: Kuota Dibatasi Dan Usia Di Bawah 65 Tahun, Apa Lagi?” *Tempo.Co*. Last modified 2022. <https://www.tempo.co/politik/aturan-haji-2022-kuota-dibatasi-dan-usia-di-bawah-65-tahun-apa-lagi--350112>.
- Ameliya, Tri Meilani. “Kepala KUH Sebut Alokasi Kuota Haji Tambahan Sudah Melalui Kajian.” *Antaranews*. Last modified 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4289527/kepala-kuh-sebut-alokasi-kuota-haji-tambahan-sudah-melalui-kajian>.
- Anderson, James. E. *Public Policy Making*. New York: Hal, Rinehart and Winston, 1979.
- Andrios, Benny. “Pemerintah - DPR Bahas Kebijakan Saudi Naikkan Anggaran Masyair Haji 1443 H.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-dpr-bahas-kebijakan-saudi-naikkan-anggaran-masyair-haji-1443-h-ffckrp>.
- . “Usulan Biaya Haji 2023, Dirjen PHU: Ini Untuk Keadilan Dan Keberlanjutan.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/usulan-biaya-haji-2023-dirjen-phu-ini-untuk-keadilan-dan-keberlanjutan-pt65hu>.
- Andriyawan, Rikkie. “Bagaimana Kebijakan Alokasi Kuota Tambahan Haji 2024 Menurut Pakar Hukum?” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://kemenag.go.id/video/bagaimana-kebijakan-alokasi-kuota-tambahan-haji-2024-menurut-pakar-hukum-utDkp>.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Cetakan 2. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Anggoro, Husni. “Kemenag Mulai Siapkan Layanan Ibadah Haji 1445 H/2024 M.” *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag RI*. Last modified 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kemenag-mulai>

- siapkan-layanan-ibadah-haji-1445-h-2024-m.
- . “Komisi VIII Dan Kemenag Sepakati Rerata BPIH 2024 Rp93,4 Juta, Jemaah Bayar Rerata Rp56,04 Juta.” *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag RI*. Last modified 2023. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/komisi-viii-dan-kemenag-sepakati-rerata-bpih-2024-rp93-4-juta-jemaah-bayar-rerata-rp56-04-juta>.
- Aristama, Faisal. “Jangan Didiamkan, Pemerintah Harus Memprotes Arab Saudi Atas Kenaikan Paket Masyair Haji 2022.” *Rmol.Id*. Last modified 2022. <https://rmol.id/politik/read/2022/06/02/535635/jangan-didiamkan-pemerintah-harus-memprotes-arab-saudi-atas-kenaikan-paket-masyair-haji-2022>.
- Arnani, Mela. “BPIH 2024 Selisih Rp 3 Juta Dari Tahun Lalu, Apa Saja Penyesuaiannya?” *Kompas.Com*. Last modified 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/11/27/200742926/bpih-2024-selisih-rp-3-juta-dari-tahun-lalu-apa-saja-penyesuaiannya>.
- Azhar, Boy. “Ikhtiar Haji Ramah Lansia, Dari Pendampingan Hingga Kursi Bisnis Pesawat.” *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag RI*. Last modified 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/ikhtiar-haji-ramah-lansia-dari-pendampingan-hingga-kursi-bisnis-pesawat>.
- Budiman, Mochammad Arif, and Dimas Bagus Wiranata Kusuma. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 1–15.
- Choironi, M. Alvin Nur. “Kepadatan Mina Tak Dapat Dielakkan, Kemenag Proaktif Atasi Laporan Jemaah.” *Islami.Co*. Last modified 2024. <https://islami.co/kepadatan-mina-tak-dapat-dielakkan-kemenag-proaktif-atasi-laporan-jemaah/>.
- Chusna, Farisa Fitria. “Kuota Haji Indonesia 2023 Bertambah 8.000 Jemaah, Ini Rinciannya.” *Kompas.Com*. Last modified 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/05/08/18211801/kuota-haji-indonesia-2023-bertambah-8000-jemaah-ini-rinciannya?lgn_method=google&google_btn=onetap.
- CN, Marcelinus Muklis, and Mangihut Siregar. “Peran Media Massa Dalam Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 4, no. 2 (2024): 133–140.
- DeLeo, Rob A., Kristin Taylor, Deserai A. Crow, and Thomas A. Birkland. “During Disaster: Refining the Concept of Focusing Events to Better Explain Long-Duration Crises.” *International Review of Public Policy* 3, no. 1 (2021): 5–28.
- Devin, Jonathan. “Muhammadiyah Harap Biaya Haji Tak Sampai Rp 69,1 Juta, Calon Jemaah Antre Lama.” *Kumparan.Com*. Last modified 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/muhammadiyah-harap-biaya-haji-tak-sampai-rp-69-1-juta-calon-jemaah-antre-lama-lzhocmutJ7Z>.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Bantul: Penerbit Samudra Biru, 2022.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 157 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Pelunasan Dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1443 H/2022 M*, 2022. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/969378>.
- El-Saha, M. Ishom. "Kenapa Komplain Fasilitas Di Mina?" *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/kenapa-komplain-fasilitas-di-mina-tc6EX>.
- Engkus. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Bekasi: PT. Kimshafi Alung, 2022.
- Fahurrahman, M. "Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Tarbawi* 2, no. 2 (2016): 14–27.
- Faizin, Muhammad. "Prinsip 'First Come First Serve' Hindari Jamaah Haji 'Terzalimi.'" *NU Online*. Last modified 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/prinsip-first-come-first-serve-hindari-jamaah-haji-terzalimi-CIAAp>.
- Fajar. "Memilih Tidak Populer, Dirjen PHU: Gus Men Lindungi Hak Nilai Manfaat Seluruh Jamaah Haji." *Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta*. Last modified 2023. <https://dki.kemenag.go.id/berita/memilih-tidak-populer-dirjen-phu-gus-men-lindungi-hak-nilai-manfaat-seluruh-jamaah-haji-gJR98>.
- Fajri, Daniel Ahmad. "Arab Saudi Izinkan Perempuan Di Atas 45 Tahun Umrah Tanpa Mahram." *Tempo.Co*. Last modified 2023. <https://www.tempo.co/internasional/arab-saudi-izinkan-perempuan-di-atas-45-tahun-umrah-tanpa-mahram-411552>.
- Fauzi, Hilman. "Soal Alokasi Tambahan Kuota Haji, Ini Penjelasan Kemenag." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/soal-alokasi-tambahan-kuota-haji-ini-penjelasan-kemenag-PWPIH>.
- Firmansyah, M. Julnis. "BPKH Sebut Kenaikan Biaya Haji Cegah Nilai Manfaat Jamaah Tergerus." *Tempo.Co*. Last modified 2023. <https://www.tempo.co/politik/bpkh-sebut-kenaikan-biaya-haji-cegah-nilai-manfaat-jamaah-tergerus-226096>.
- . "Jika Jamaah Tak Mampu Lunasi Biaya Naik Haji, Kemenag Bakal Cari Pengganti." *Tempo.Co*. Last modified 2023. <https://www.tempo.co/politik/jika-jamaah-tak-mampu-lunasi-biaya-naik-haji-kemenag-bakal-cari-pengganti-226064>.
- Ghofur, M. Abdul. *Haji Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2012.
- Gosseries, Axel. "Theories of Intergenerational Justice: A Synopsis." *Sapiens* 1, no. 1 (2008): 61–71.
- Grimmelikhuijsen, Stephan, Sebastian Jilke, Asmus Leth Olsen, and Lars Tummers. "Behavioral Public Administration: Combining Insights from Public Administration and Psychology." *Public Administration Review* 77, no. 1 (2017): 45–56.

- Hakim, Lutfi. “Kestinambungan Dan Perubahan Kebijakan Anggaran Pendidikan Islam Di Kabupaten Gresik Periode 2010-2024.” Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70966>.
- Al Hamasy, Atiek Ishlahiyah. “Berangkat Tanpa Pendamping, Kemandirian Jemaah Haji Lansia Diuji.” *Kompas.Id*. Last modified 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/26/haji-2>.
- Handoyo. “Soal Usulan Kenaikan Biaya Haji, Kepala BPKH: Sangat Masuk Akal.” *Kontan.Co.Id*. Last modified 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/soal-usulan-kenaikan-biaya-haji-kepala-bpkh-sangat-masuk-akal>.
- Hidayati, Arina. “Fluktuasi Biaya Haji Dalam Rupiah, Dolar AS Dan Dinar: Perspektif Investasi Syariah.” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 129–139.
- Hogwood, Brian W. *Policy Analysis for The Real World*. Oxford: Oxford University Press, 1984.
- Hutabarat, Delvira. “Headline: Kuota Haji 2022 Indonesia 100.051 Orang, Prioritas Kriteria Jemaah?” *Liputan6.Com*. Last modified 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4945037/headline-kuota-haji-2022-indonesia-100051-orang-prioritas-kriteria-jemaah>.
- Indriantari, Windy Dyah. “Ingat, Tidak Ada Lagi Kesempatan Salip Antrean Haji.” *Media Indonesia*. Last modified 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/579625/ingat-tidak-ada-lagi-kesempatan-salip-antrean-haji>.
- . “Kuota Pendamping Jemaah Lansia Tetap Tak Ada Di Haji 2024.” *Metronews*. Last modified 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCRLgW-kuota-pendamping-jemaah-lansia-tetap-tak-ada-di-haji-2024>.
- Irawan, Fajar Sodiq. “Policy Learning Dalam Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Insight Dari Gunungkidul.” *Indonesian Journal of Political Studies (IJPS)* 1, no. 2 (2021): 128–152.
- Irwanto, Bambang H. “Haji 2023; Inovasi Program Ramah Lansia Terus Dimatangkan.” *Timesindonesia.Co.Id*. Last modified 2023. <https://haji.timesindonesia.co.id/read/453602/haji-2023-inovasi-program-ramah-lansia-terus-dimatangkan>.
- . “Kemenag RI Hapus Pendamping Jemaah Haji Lansia Dan Mahram.” *Timesindonesia.Co.Id*. Last modified 2023. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/455053/kemenag-ri-hapus-pendamping-jemaah-haji-lansia-dan-mahram>.
- Isabella, and Firdaus Komar. “Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 5, no. 2 (2020): 74–79.
- Islamy, Muh. Irfan. *Kebijakan Publik*. Ed. 3, Cet. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023.
- Istahar, Hasbiyani Kamilah, Kirana Putri Aulia, Windy Dermawan, and Akim

- Akim. "Indonesian Hajj Diplomacy To Increase Hajj Quota During 2015-2023." *Dynamics of Politics and Democracy* 2, no. 2 (2023): 49–60. <https://goodwoodpub.com/index.php/DPD/article/view/1884>.
- Iswahyudi, Fajar. "Kontekstualisasi Teori Multi Arus: Studi Kasus Kegagalan Pembuatan Kebijakan Karantina Wilayah Di DKI Jakarta." *Jurnal Administrasi Publik* 16, no. 1 (2020): 1–18.
- . "Perubahan Kebijakan Pasca Suksesi Kepemimpinan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Banjir Di DKI Jakarta Tahun 2017-2020." Disertasi Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2021. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/203800>.
- John W, Kingdon. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Ed. 2. Edinburg: Pearson Education Limited, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Bertambah Penduduk, DPR Dorong Pemerintah Minta Tambahan Kuota Ke Arab Saudi." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2021. <https://kemenag.go.id/nasional/bertambah-penduduk-dpr-dorong-pemerintah-minta-tambahan-kuota-ke-arab-saudi-r4oj5m>.
- . *Keputusan Menteri Agama KMA No 405 Tahun 2022 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022 M*. Indonesia, 2022. <https://kemenag.go.id/informasi/keputusan-menteri-agama-kma-no-405-tahun-2022-tentang-kuota-haji-indonesia-tahun-1443-h-2022-m>.
- . *Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 Tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 H/2024 M*, 2024. https://haji.kemenag.go.id/v5/storage/strapi-cms-landing-page/cms/Edaran_Pelunasan_Kuota_hj_khs_tambahan_1445_2024_3c3eaa78a2.pdf.
- . *Keputusan Menteri Agama Nomor 430 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2023 M*, 2022.
- . *Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler*. Indonesia, 2021. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/968407>.
- . *Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama*. Indonesia, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313861/peraturan-menag-no-25-tahun-2024>.
- . *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Indonesia, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>.
- . *Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Usaha Kegiatan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*. Indonesia, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175861/peraturan-menag-no-5-tahun->

2021.

- . *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*. Indonesia, 2021. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/968074>.
- Khalida, Melalusa Suthira. “Anggota Komisi VIII DPR Tolak Kenaikan Biaya Haji Karena Memberatkan.” *Antaranews*. Last modified 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3379098/anggota-komisi-viii-dpr-tolak-kenaikan-biaya-haji-karena-memberatkan>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. “Haji, Negara, Dan Partisipasi Publik.” *Kompas.Com*. Last modified 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/29/14254861/haji-negara-dan-partisipasi-publik?page=all>.
- Khoeron, Moh. “BPIH, Antara Kalkulasi Biaya Dan Kebijakan Politik.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2022. <https://kemenag.go.id/opini/bpih-antara-kalkulasi-biaya-dan-kebijakan-politik-cqfkni>.
- Kontributor. “Biaya Haji Disepakati Rata-Rata Rp90 Juta, Menag Ingatkan Keberlangsungan Nilai Manfaat.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/biaya-haji-disepakati-rata-rata-rp90-juta-menag-ingatkan-keberlangsungan-nilai-manfaat-kfd9sv>.
- . “Biaya Perjalanan Ibadah Haji 1443 H Diusulkan Rp 45juta.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/biaya-perjalanan-ibadah-haji-1443-h-diusulkan-rp45juta-7oh6id>.
- . “Dirjen PHU: Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji Perlu Diproporsionalkan.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-phu-penggunaan-nilai-manfaat-dana-haji-perlu-diproporsionalkan-nsps5h>.
- . “Kilas Balik 2022, Saudi Naikkan Anggaran Masya’ir, Pemerintah & DPR Sepakati Solusi.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-saudi-naikkan-anggaran-masya039ir-pemerintah-amp-dpr-sepakati-solusi-ov889u>.
- . “Komnas Haji: Kenaikan Biaya Demi Kemaslahatan Dan Keberlangsungan Keuangan Haji.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/komnas-haji-kenaikan-biaya-demi-kemaslahatan-dan-keberlangsungan-keuangan-haji-5aet9p>.
- . “Menakar Kewajaran Biaya Haji 2023.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/opini/menakar-kewajaran-biaya-haji-2023-7p8v7l>.
- . “Pengamat Nilai BPIH 2023 Beraroma Skema Ponzi?” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023.

- <https://kemenag.go.id/nasional/pengamat-nilai-bpih-2023-beraroma-skema-ponzi-sspe57>.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Cet 4. Thousand Oaks California: SAGE Publications, 2018.
- Kurniawan. "Panja BPIH Apresiasi Idealisme Menag Dalam Usulan Biaya Haji." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/panja-bpih-apresiasi-idealisme-menag-dalam-usulan-biaya-haji-mvf22r>.
- Kurniawan, Willy. "Mungkinkah Nilai Manfaat Dana Haji Habis Buat Jemaah Ke Tanah Suci?" *CNN Indonesia*. Last modified 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230207142005-78-909946/mungkinkah-nilai-manfaat-dana-haji-habis-buat-jemaah-ke-tanah-suci/2>.
- Kurniawati, Dyah Estu. "Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis." *Jurnal Studi Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2013): 154–167.
- Lande, Valentini Febriani Bala. "Perubahan Kebijakan Pendaftaran Tanah Di Kota Makassar." Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13650/2/E012201002_tesis_04-02-2022_1-2.pdf.
- Madyansyah, Muhammad Marjan. "Haji 2023: Rerata Bipih Jemaah 49,8 Juta, Lunas Tunda 2020 Tidak Perlu Nambah." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/haji-2023-rerata-bipih-jemaah-498-juta-lunas-tunda-2020-tidak-perlu-nambah-j9xyni>.
- . "Rapat Dengan DPR, Menag Sampaikan Rencana Pembagian Kuota Tambahan Haji 2024." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/rapat-dengan-dpr-menag-sampaikan-rencana-pembagian-kuota-tambahan-haji-2024-ALa1C>.
- Marliza. "Menuju Haji Yang Efisien Dan Berkeadilan: Optimalisasi Sistem Pendaftaran Dan Pengelolaan Waiting List Jemaah Haji Di Jawa Barat." *Gema Perencana* 2, no. 3 (2024): 457–470.
- Martaon, Anggi Tondi. "Biaya Haji Naik Mendadak, Kemenag Tak Bisa Berbuat Banyak." *Medcom.Id*. Last modified 2022. https://www.medcom.id/nasional/politik/8N0G56AK-biaya-haji-naik-mendadak-kemenag-tak-bisa-berbuat-banyak#google_vignette.
- Minggu, Arkadius, Norbertus Jegalus, and Petrus Tan. "Analisis Prinsip Peredaan Menurut Rawls." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 4 (2024): 27–34.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016): 195–224.
- Mulkin, Fadhilla Ilham, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada

- Jamaah Haji.” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 708–721.
- Mursid, Fauziah. “Biaya Haji Terus Naik, BPKH Diminta Reformasi Strategi Investasi Dana Pengelolaan Haji.” *Republika*. Last modified 2024. <https://sharia.republika.co.id/berita/s6xna0502/biaya-haji-terus-naik-bpkh-diminta-reformasi-strategi-investasi-dana-pengelolaan-haji>.
- Muslimah, Salmah. “Kemenag Jawab Soal Alokasi Kuota Tambahan Hingga Kabar Haji Khusus Bayar Rp 1 M.” *Kumparan.Com*. Last modified 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/kemenag-jawab-soal-alokasi-kuota-tambahan-hingga-kabar-haji-khusus-bayar-rp-1-m-23Wo3Mr4XHL/full>.
- Muzakki, Akh. *Sosiologi Haji: Belajar Dari Kisah Nyata Di Arab Saudi*. Surabaya: The UINSA Press, 2024.
- Nafisah, Naylan. “Penetapan Biaya Haji Tahun 2023 Dalam Perspektif Teori Masalah.” Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2023. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25316/1/Tesis_2100018009_Naylan_Nafisah_Full_Tesis_-_Naylan_Nafisah.pdf.
- Niam, Ahmad Mukafi. “Ingat! PPN Di Arab Saudi 15 Persen.” *NU Online*. Last modified 2022. <https://www.nu.or.id/internasional/ingat-ppn-di-arab-saudi-15-persen-zWwdu>.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik Dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Ed. 7. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2023.
- Nurhidayat, Despihan. “Kuota Tambahan Dibagi Dua Untuk Haji Reguler Dan Khusus.” *Media Indonesia*. https://mediaindonesia.com/humaniora/658524/kuota-tambahan-dibagi-dua-untuk-haji-reguler-dan-khusus#goog_rewarded.
- Nurita, Dewi. “DPR Dan Menag Yaqut Bahas Lagi Polemik Tambahan Anggaran Haji 2022 Siang Ini.” *Tempo.Co*. Last modified 2022. <https://www.tempo.co/politik/dpr-dan-menag-yaqut-bahas-lagi-polemik-tambahan-anggaran-haji-2022-siang-ini-346080>.
- Nurunnasikin, Indra Indra, and Kuni Afifah. “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji.” *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2024): 1–11.
- Parlemen, Biro Pemberitaan. “Ada Indikasi Pelanggaran Undang-Undang Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus.” *Media DPR RI*. Last modified 2024. <https://emedia.dpr.go.id/2024/06/18/ada-indikasi-pelanggaran-undang-undang-terkait-penambahan-kuota-haji-khusus/>.
- . “Selain Pengalihan Kuota Haji, Pansus Angket Haji DPR Juga Temukan Indikasi Korupsi.” *E-Media DPR RI*. Last modified 2024. <https://emedia.dpr.go.id/2024/07/10/selain-pengalihan-kuota-haji-pansus-angket-haji-dpr-juga-temukan-indikasi-korupsi/>.
- Parsons, Wayne. *Public Policy : Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2014.
- Paskalino Dadi, Agustinus F, Firzhal Arzhi Jiwantara, Irman Putra, Arief Fahmi

- Lubis, and Heri Budianto. "Kebijakan Diskresi Dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10 (2024): 3807–3811. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Cet 9. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Keppres No 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 Tentang BPIH 1443 H/2022 M Yang Bersumber Dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, Dan Dana Efisiensi*, 2022. <https://kemenag.go.id/informasi/keppres-no-8-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-keputusan-presiden-nomor-5-tahun-2022-tentang-bpih-1443-h-2022-m-yang-bersumber-dari-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji--nilai-manfaat--dan-dana-efisiensi>.
- . *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia*. Indonesia, 2005.
- . *Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*. Indonesia, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019>.
- Pradipta, Galih. "Biaya Haji 2022 Rp39,8 Juta Setelah Arab Saudi Izinkan 1 Juta Jemaah Calon Haji, Apa Saja Rinciannya?" *BBC.Com*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60413082>.
- Prasetyo, Whisnu Bagas. "Demi Asas Keadilan, Pendamping Haji Lansia Dan Mahram Ditiadakan." *Beritasatu.Com*. Last modified 2023. <https://www.beritasatu.com/nasional/1043156/demi-asas-keadilan-pendamping-haji-lansia-dan-mahram-ditiadakan>.
- Prasetyo, Wibowo. "Haji Ramah Lansia 2023, Jangkar Layanan Haji Masa Depan." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/kolom/haji-ramah-lansia-2023-jangkar-layanan-haji-masa-depan-v5Urc>.
- Ramadhani, Aisyah Wulan, Riana Susmayanti, and Herlin Wijayati. "Menelusuri Sistem Kuota Haji Di Indonesia: Perspektif Hukum." *Rechtjiva* 2, no. 1 (2025): 49–65.
- Rani, Putri. "Dirjen PHU Akhirnya Buka-Bukaan Soal Alokasi Kuota Tambahan Haji." *Tvonenews.Com*. Last modified 2024. <https://www.tvonenews.com/religi/245944-dirjen-phu-akhirnya-buka-bukaan-soal-alokasi-kuota-tambahan-haji?page=4>.
- Sani, M. Rusydi. "Estimasi Keberangkatan Haji Makin Lama, Ini Penjelasan Kemenag." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2022. <https://kemenag.go.id/read/estimasi-keberangkatan-haji-makin-lama-ini-penjelasan-kemenag-nvkj4>.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. "Dubes RI Akan Negosiasi Ulang Biaya 'Masyair' Untuk Haji 2023." *Kompas.Com*. Last modified 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/05/10110121/dubes-ri-akan-negosiasi-ulang-biaya-masyair-untuk-haji-2023>.

- Saputra, Harja. "Menimbang Alasan Kenaikan Biaya Haji." *Detik.Com*. Last modified 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-6568584/menimbang-alasan-kenaikan-biaya-haji>.
- Saputra, Yuli. "Calon Jemaah Haji Dibatasi Usia Maksimal 65 Tahun: Kecewa Sudah Ditunda Dua Tahun, Sekarang Ada Pembatasan." *BBC.Com*. Last modified 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61696923>.
- Shaid, Nur Jamal. "Kritik Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Pengamat: Naiknya Terlalu Tinggi." *Kompas.Com*. Last modified 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/01/27/181604826/kritik-usulan-kenaikan-biaya-haji-2023-pengamat-naiknya-terlalu-tinggi>.
- Sholatiah. "Efek Domino Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 42–56.
- Siregar, Muhammad Rizki Aulia, and Syafruddin Syam. "Polemik Naiknya Biaya Perjalanan Haji Di Indonesia Tahun 2023 Ditinjau Dari Siyasah Maliyah." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2934–2945.
- Stewart, Joseph, David M. Hedge, and James P. Lester. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Cet. 3. Boston: Kluwer Law International, 208AD.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. 2. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.
- Sulthon, Muhammad. "HNW Minta Pemerintah Kaji Ulang Soal Kenaikan Biaya Ibadah Haji." *Detik.Com*. Last modified 2023. <https://news.detik.com/berita/d-7078678/hnw-minta-pemerintah-kaji-ulang-soal-kenaikan-biaya-ibadah-haji>.
- Superuser, BPKH. "5 Perbedaan Haji Furoda Dan Haji Plus Yang Perlu Dipahami." *BPKH*. Last modified 2024. <https://bpkh.go.id/perbedaan-haji-furoda-dan-haji-plus/>.
- . "Biaya Haji Indonesia Dari Tahun Ke Tahun." *Bpkh.Go.Id*. Last modified 2023. <https://bpkh.go.id/kontroversi-biaya-haji/>.
- Susilo, Nina. "Penyerapan Kuota Tambahan Jemaah Haji Dan Persiapannya Perlu Segera Direalisasikan." *Kompas.Com*. Last modified 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/26/penyerapan-kuota-tambahan-dan-persiapannya-perlu-segera-direalisasikan>.
- Sutiyono, Wahyu, Agus Pramusinto, and Eko Prasajo. "Introduction to the Mini Special Issue: Understanding Governance in Indonesia." *Policy Studies* 39, no. 6 (2018): 581–588. <https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1530416>.
- Suwitri, Sri. *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014. <https://repository.ut.ac.id/4631/>.
- Syafiuddin, Aziz. "Haji Cukup Sekali, Menuju Kebijakan Haji Yang Adil Dan Merata." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/haji-cukup-sekali-menuju-kebijakan-haji-yang-adil-dan-merata-ZRYkS>.
- Syakura, Abdan. "Tak Ada Ruang Negosiasi Untuk Kuota Haji." *Republika*. Last modified 2022. <https://www.republika.id/posts/27665/tak-ada-ruang-negosiasi-untuk-kuota-haji>.

- Syamsir, Ahmad. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018." *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2019): 69–81.
- Tajchan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Edited by Dede Mariana and Caroline Paskarina. Cet. 1. Bandung: APII, 2006.
- Vitiara, Mustarini Bella. "Ditjen PHU: Haji Pasca Pandemi, Haji Era Baru." *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag RI*. Last modified 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/ditjen-phu-haji-pasca-pandemi-haji-era-baru>.
- . "Komnas Haji Sebut Kemenag Tidak Langgar Kuota Haji." *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag RI*. Last modified 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/komnas-haji-sebut-kemenag-tidak-langgar-kuota-haji>.
- . "Masih Usulan Awal, Biaya Haji Akan Dibahas Panja Sebelum Disepakati." *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag RI*. Last modified 2023. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/masih-usulan-awal-biaya-haji-akan-dibahas-panja-sebelum-disepakati>.
- . "Usulan BPIH 2024, Kenaikan Kurs Jadi Faktor Penentu." *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag RI*. Last modified 2023. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/usulan-bpih-2024-kenaikan-kurs-jadi-faktor-penentu>.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Cet. 1. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- . *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, Dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS, 2016.
- Yolandha, Friska. "Kenaikan Inflasi Dan Pajak Di Arab Saudi Penyebab Biaya Haji 2022 Naik." *Republika*. Last modified 2022. <https://khazanah.republika.co.id/berita/rcr3hb370/kenaikan-inflasi-dan-pajak-di-arab-saudi-penyebab-biaya-haji-2022-naik>.
- Yuliana. "Visi 2030: Analisis Perubahan Kebijakan Arab Saudi Terhadap Haji Dan Umroh." Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/66463/1/21200012094_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.